

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat adalah mendapatkan perlindungan atas kekerasan yang terjadi, terutama pada perempuan dan anak. Saat ini jumlah kasus kekerasan semakin mengkhawatirkan, sebagaimana yang terjadi di Kota Lhokseumawe jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada periode 2021-2025 masih cukup tinggi, karena masih didapati kasus kekerasan pada setiap tahun yang berjumlah di atas 20 kasus, baik kekerasan terhadap anak ataupun perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menerapkan akuntabilitas terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang relevan seperti pegawai DP3AP2KB, korban kekerasan, orang tua korban, masyarakat umum, dan aktivis perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat dikatakan telah baik, karena DP3AP2KB Kota Lhokseumawe telah berusaha menerapkan akuntabilitas yang baik seperti salah satunya pada aspek akuntabilitas kebijakan didapati DP3AP2KB Kota Lhokseumawe berusaha berkomitmen penuh dalam melaksanakan tanggungjawabnya, dibuktikan dengan memberikan bantuan kepada korban baik bantuan pendampingan psikologis dan juga hukum. Selain itu pada aspek akuntabilitas program, didapati DP3AP2KB Kota Lhokseumawe menyediakan berbagai layanan perlindungan terhadap korban kekerasan, seperti menyediakan rumah aman, dan juga menyediakan program lainnya. Akan tetapi dalam menerapkan akuntabilitas, DP3AP2KB Kota Lhokseumawe menghadapi beberapa hambatan, seperti adanya korban kekerasan yang takut untuk memberikan laporan (melanjutkan proses hukum), keterbatasan anggaran untuk menjalankan program, dan perlu adanya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Lhokseumawe terhadap seluruh kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada DP3AP2KB Kota Lhokseumawe untuk melakukan evaluasi secara berkala.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Perlindungan, Kekerasan, Perempuan dan Anak.*

ABSTRACT

Accountability is one of the obligations held by public servants in providing services to the community. One of the services needed by society is protection against acts of violence, particularly those targeting women and children. Currently, the number of violence cases is increasingly alarming. In Lhokseumawe City, for instance, the number of cases of violence against women and children during the 2021–2025 period remains relatively high, as more than 20 cases are still recorded each year, whether involving children or women. The purpose of this study is to examine the accountability of the DP3AP2KB of Lhokseumawe City in protecting women and children from violence, as well as to identify the obstacles faced in implementing accountability for women and children who become victims of violence. This research employs a qualitative approach with purposive sampling techniques to determine informants. Data were collected through interviews, observations, and documentation from relevant parties such as DP3AP2KB staff, victims of violence, victims' parents, the general public, and women and child activists. The findings show that the accountability of the DP3AP2KB of Lhokseumawe City in protecting women and children from violence can be considered good, as the institution has made efforts to implement proper accountability. For instance, in terms of policy accountability, DP3AP2KB Lhokseumawe demonstrates a full commitment to fulfilling its responsibilities, as evidenced by the provision of assistance to victims, including psychological and legal support. Furthermore, in terms of program accountability, DP3AP2KB Lhokseumawe provides various protection services for victims of violence, such as safe houses and other supportive programs. However, in implementing accountability, DP3AP2KB Lhokseumawe faces several challenges, including victims' fear of reporting (or pursuing legal processes), budget limitations in running programs, and the need for policy evaluations of all measures implemented by the institution. Based on the research findings, it is recommended that DP3AP2KB Lhokseumawe conduct regular evaluations.

Keywords: Accountability, Protection, Violence, Women and Children.